

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan Indonesia terus menunjukkan kinerja gemilang. Dalam lima bulan pertama 2013, bank-bank umum di Indonesia meraup laba bersih Rp29,5 triliun, naik 21,4% dibanding periode 2012 yang tercatat Rp24,3 triliun. Setelah di dera krisis moneter pada 1997/1998, kini industri perbankan nasional berubah menjadi lebih mengkilat. Para investor asing pun banyak melirik sektor ini sebagai ladang investasi. Hingga Mei 2013, semua indikator perbankan nasional menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Kinerja perbankan yang menggembirakan itu dapat dilihat dari sisi permodalan, likuiditas, rasio kredit bermasalah (NPL), dan pertumbuhan kredit. Rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/ LDR*) tercatat 78,45% dan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) 1,41%. Data Bank Indonesia ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan kredit telah mendongkrak pendapatan bunga bersih. Hingga Mei 2013, jumlah kredit yang tersalurkan mencapai Rp1.889,4 triliun, naik 23,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp1.531,5 triliun. Dari 161 bank umum, per Mei 2013, total aset mereka mencapai Rp3.136,4 triliun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ekonomi.metrotvnews.com (27 Juli 2014)

Publik berharap pelaku bisnis di sektor ini mampu mempertahankan prestasi ini. Para pengelola bank tidak boleh berpuas diri dan terlena dengan kinerja yang gemilang ini. Para bankir masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menggerakkan perekonomian negeri ini. Maklum, masyarakat masih memimpikan industri perbankan nasional yang efisien. Jika perbankan efisien, masyarakat pun berharap bisa menikmati suku bunga kredit yang lebih rendah.

Memang masyarakat tidak bisa memaksa bank-bank untuk segera menurunkan suku bunga kredit. Bank tentu memiliki dasar perhitungan yang matang sebelum memutuskan untuk memangkas suku bunga. Namun masyarakat percaya bankir pun menyadari suku bunga kredit yang tinggi bagus untuk perekonomian nasional. Meski demikian, para bankir di Indonesia perlu pula memperhatikan sepak terjang para kompetitor di negara lain. Ambil contoh hasil survei Pricewaterhouse Cooper (PwC) Indonesia, yang menemukan fakta bahwa industri perbankan nasional masih menghadapi masalah efisiensi biaya operasional.

Efisiensi perbankan di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk di Asia Tenggara. Perbankan nasional rata-rata mendapatkan bunga bersih (*Net Interest Margin/ NIM*) sekitar 6%, jauh di atas rata-rata NIM di kawasan Asean yang berkisar 3%-4%.<sup>2</sup> Kalau pun masyarakat tidak bisa menyalahkan bankir sepenuhnya atas tingginya NIM tersebut, namun menjadi bahan perenungan bagi para bankir untuk mengupayakan NIM yang moderat. Di tengah tekanan inflasi ke

---

<sup>2</sup> Businessnews.co.id (27 juli 2014)

depan lebih besar, tentu ini menjadi pekerjaan berat bagi Bank Indonesia dan perbankan nasional untuk menjaga kestabilan suku bunga.

Apabila tingkat risiko bisnis di negeri ini terbilang masih tinggi. Alhasil, kalangan perbankan mau tak mau harus menambah premi risiko dalam penetapan suku bunga kreditnya. Ujung-ujungnya suku bunga kredit akan bergerak naik mengikuti irama risiko yang berkejolak. Juga harus disadari, kendati risiko kredit bermasalah (NPL) *gross* masih terjaga pada kisaran 3%, namun tekanan atas risiko kredit tetap menjadi risiko utama yang harus dikelola para bankir.

Ketika pasar kredit semakin ketat, mau tak mau, perbankan akan menurunkan NIM-nya, dimana suku bunga kredit akan dipangkas. Sebaliknya, persaingan ketat telah terjadi di pasar dana pihak ketiga (DPK). Untuk mendapatkan DPK, perbankan terpaksa menawarkan suku bunga simpanan yang menarik atau memberikan iming-iming hadiah menawan. Lebih-lebih deposan besar acapkali meminta bunga khusus (*special rate*) yang membebani bank karena biaya dana (*cost of fund*) menjadi melonjak. Para pengelola bank harus memperhatikan kekuatan diri, terutama terkait permodalan dan ekspansi jaringan. Bagaimanapun, untuk menjangkau pasar yang begitu luas, perbankan butuh dukungan modal dan jaringan.

Keterbatasan modal jelas akan memperhatikan kekuatan diri, terutama terkait permodalan dan ekspansi kredit dan memperbarui teknologi. Permintaan terhadap dana perbankan kian meningkat seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Diharapkan para pengelola bank semakin serius dan

disiplin memupuk permodalan agar mampu menjangkau potensi pasar domestik yang besar ini.

Dalam hal ini, bank bukan saja bisa menjual produk berupa dana dan kredit, melainkan juga layanan yang berorientasi pada pendapatan bukan bunga (*Fee Based Income* atau FBI). Dengan semakin tingginya FBI, otomatis memberikan ruang bagi bank menurunkan suku bunga kredit karena pendapatan bunga kredit (*interest income*) bisa dikompensasikan oleh FBI yang kian membesar.<sup>3</sup> Kinerja perbankan memang suka mengalami pasang surut, setelah terkuaknya kasus Bank Century, pada saat itu banyak nasabah yang menaruh kurangnya rasa percaya kepada bank. Padahal sebagai perusahaan yang dekat dengan masyarakat (nasabah) seharusnya bank memiliki sikap transparan dalam menjalankan perusahaannya sehingga tidak menimbulkan rasa kurang percaya dari masyarakat. Untuk itu perlunya BI di dalam meningkatkan pengawasannya kepada bank-bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dunia perbankan akan terus mendapat kredibilitas yang baik dari masyarakat.

Lambatnya pemulihan ekonomi kawasan eropa dan Amerika Serikat merupakan masalah serius yang harus diidentifikasi oleh perbankan indonesia. Jalur perdagangan dan keuangan ditenggarai menjadi faktor utama menjalarnya eksekrisis ekonomi dunia terhadap perekonomian indonesia sistem perekonomian indonesia yang bersifat terbuka menjadi pintu masuk efek krisis keuangan AS dan krisis utang eropa. Sinyal ini sudah dengan jelas ditangkap dari melambatnya

---

<sup>3</sup>Riaupos.co (23 Juli 2014)

permintaan barang-barang ekspor dari dua kawasan tadi. Hasilnya, bank yang melayani keperluan transaksi ekspor dan impor bagi nasabahnya tentu terkena dampak negatifnya. Tak terkecuali adalah ancaman kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang disebabkan seretnya permintaan barang-barang ekspor yang membuat kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dari debitur yang berorientasi ekspor terganggu.

Sejauh ini memang perkembangan kredit perbankan ditandai dengan kenaikan NPL yang tipis pada awal tahun ini. NPL meningkat sekitar 4% atau sebesar Rp2,06 triliun dari Rp49,36 triliun pada akhir februari 2013 menjadi Rp51,42 triliun per akhir februari tahun ini. Namun, persentase itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring dengan kucuran kredit yang naik mencapai Rp2.203 triliun per februari. Bandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tercatat Rp1.773 triliun. Kredit bermasalah terdiri atas kredit rupiah sebesar Rp1.844 triliun dan kredit valuta asing sekitar Rp358,6 triliun. Melihat kecenderungan NPL tersebut, BI optimis target pertumbuhan kredit yang dipatok berkisar 25-27% bakal terealisasi tahun ini meski kalangan perbankan memasang target konservatif sekitar 22-23%. Penetapan target pertumbuhan kredit yang lebih besar dari Rencana Bisnis Bank (RBB) didasari dengan pertumbuhan kredit tahun lalu yang mencapai 24,5%, prediksi inflasi yang masih rendah, dan nilai tukar rupiah yang cenderung tidak

fluktuatif.<sup>4</sup> Prediksi pertumbuhan kredit ini diharapkan dapat membuat dunia perbankan lebih sehat di dalam menjalankan kegiatan perusahaannya.

Kepemilikan saham dan intervensi pemerintah terhadap perbankan berpengaruh buruk terhadap kinerja perbankan nasional. Pengaruh kepemilikan saham pemerintah pada bank hanya berpengaruh positif pada *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan pada *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Capital Adequency Ratio* (CAR), serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR) justru berdampak negatif.

Eko Budiwiyono menegaskan, intervensi pemerintah di bank BUMN terjadi dalam bentuk KKN. Kegiatan yang sering diintervensi oleh pemerintah dalam hal perekrutan karyawan, penentuan komisaris dan direksi, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran kredit. Intervensi menyebabkan manajemen bank tidak berjalan secara optimal karena merusak gaya kepemimpinan dan budaya kerja, sehingga kinerja bank dapat mengalami stagnansi dan bahkan menurun.

Berdasarkan penelitian beliau terhadap 121 bank, faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja perbankan adalah sumberdaya manusia. Menurutnya, rasio beban personalia terhadap beban operasional sebagai proksi perhatian bank terhadap SDM menunjukkan pengaruh positif semua ukuran kinerja. Ukuran kinerja yang memberikan respon paling besar terhadap faktor SDM adalah LDR, kemudian CAR, ROE, NIM, dan ROA. Temuan ini menunjukkan industri perbankan dan

---

<sup>4</sup>Infobanknews.com 24 april 2012

otoritas moneter perlu memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kompetensi dari SDM yang terlibat dalam industri perbankan.

Dia menganjurkan pemerintah mengurangi kepemilikan sahamnya di perbankan nasional dan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang mampu mengelola bank secara profesional. Selain dikurangi secara bertahap, pengurangan kepemilikan tersebut harus ditempuh dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan mekanisme yang tepat sehingga pelepasan saham dapat memberikan hasil yang maksimal.<sup>5</sup> Hasil yang maksimal ini tentunya mesti lepas dari intervensi pemerintah, karena seharusnya pemerintah tidak terlalu mencampuri industri perbankan ini karena industri ini diharapkan menjadi industri yang transparan kepada publik.

Setelah krisis ekonomi 1997-1998, banyak usaha yang bisnisnya menjadi macet, sehingga ini juga menyebabkan makin banyaknya kredit macet yang membuat beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas ini makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran (*rush*).

Goncangan yang terjadi pada satu bank tentu saja juga akan menimbulkan goncangan lebih besar pada sistem perbankan secara umum, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Oleh karena itu, sejak 2006 Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan melaksanakan GCG, sehingga bisnis perbankan bisa sehat. Hal itu termaktub dalam PBI 8/4/2006 untuk pelaksanaan

---

<sup>5</sup>Suaramerdeka.com 04 oktober 2011

GCG bagi bank umum guna meningkatkan *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Hal itu juga karena BI menyadari bahwa dulu pengelolaan industri perbankan itu buruk, menyusul adanya liberalisasi tanpa peraturan dan pengawasan ketat. GCG telah pula dikukuhkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai pilar keempat dengan landasan berpikir bahwa aplikasi GCG akan memperkuat kondisi internal perbankan nasional.<sup>6</sup> Untuk itu diharapkan bahwa prinsip-prinsip GCG (*TARIF/Transparency, Accountability, Reliability, Independency, Fairness*) dapat dijalankan dengan baik oleh industri perbankan, sehingga mampu menjadi industri yang memiliki nilai baik di mata masyarakat.

Bank Indonesia mengakui kasus perbankan yang terjadi akhir-akhir ini karena tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) bank tidak berjalan baik. Untuk itu, BI akan meninjau ulang struktur kepemilikan bank di Indonesia.

"Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap performa perbankan. BI akan meninjau kembali struktur kepemilikan bank meski ini masih dalam perdebatan," ujar Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.

Menurut dia, kasus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan kesempatan bagi BI untuk introspeksi guna menegakkan GCG di perbankan. Dalam GCG, lanjut

---

<sup>6</sup>Neraca.co.id (08/01/2012)

Halim, terdapat integritas, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, yang menjadi pertahanan lapis utama perbankan. "Ini penting, karena tanpa GCG industri perbankan tidak akan mendapat kepercayaan publik," ujarnya.

"Perbaikan prospek ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah maupun perbankan," kata Halim.

Aturan yang akan bernama Aturan Penataan Struktur Kepemilikan Bank itu sebelumnya banyak disebut-sebut dengan istilah aturan kepemilikan saham mayoritas. Bank Indonesia (BI) menyatakan aturan yang bertujuan menata ulang struktur kepemilikan bank bakal dikeluarkan pada akhir Juli 2012.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menegaskan, aturan yang akan bernama Aturan Penataan Struktur Kepemilikan Bank itu sebelumnya banyak disebut-sebut dengan istilah aturan kepemilikan saham mayoritas atau pembatasan kepemilikan saham. "Sebetulnya aturannya sudah diputus di Rapat Dewan Gubernur. Akhir Juli mudah-mudahan sudah bisa dioperasikan," kata Halim, dalam Diskusi Panel: Peta Persaingan Perbankan Pasca Pembatasan Saham Mayoritas di Bogor, Minggu (24/6) malam.<sup>7</sup> Seperti diketahui, bank sentral akan mengatur kepemilikan saham perbankan, yang dikaitkan dengan tingkat kesehatan masing-masing bank. Berdasarkan beleid tersebut, investor lembaga keuangan

---

<sup>7</sup> Jakarta Globe (25 juni 2012)

(termasuk bank) bisa memiliki maksimal 40%, badan hukum non lembaga keuangan dengan batas maksimal 30%, sementara untuk investor perorangan batas maksimal kepemilikan 20%.

"Kami akan memberikan waktu transisi tiga kali masa penilaian tingkat kesehatan bank (1,5 tahun) agar bank bisa memperbaiki tingkat kesehatannya, jadi sampai Desember 2013. Ini hanya berlaku saat aturan baru dikeluarkan. Nanti lewat itu, bila ada penurunan tingkat kesehatan di bawah level dua akan langsung dikenakan, jadi harus divestasi saham," papar Halim.

Halim menjelaskan, BI akan langsung mengenakan aturan tersebut kepada bank yang selama 1,5 tahun tidak bisa menaikkan tingkat kesehatannya ke level dua. Adapun yang menjadi aspek BI dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah profil risiko, tata kelola, permodalan, begitu pula rentabilitas, dan profitabilitas.

"Untuk investor lama, agar tidak kena aturan ini, harus memenuhi semua aspek tersebut secara baik. Ini yang paling utama kita nilai *good corporate governance* (GCG), harus di level dua. Sebab, perilaku (tata kelola) bank ini penting terhadap keamanan banknya," tandas Halim. Pentingnya mekanisme corporate governance serta didampingi oleh struktur kepemilikan yang baik memang di harapkan dapat memperbaiki kinerja perbankan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja perbankan, diantaranya:

1. Rendahnya tingkat efisiensi kegiatan operasional.
2. Keterbatasan modal.
3. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil.
4. Intervensi yang berlebihan oleh pemerintah.
5. Rendahnya mekanisme *corporate governance*.
6. Struktur kepemilikan yang masih lemah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan keterbatasan dana dan waktu bagi peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada masalah “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perbankan (studi kasus pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2013). Dengan indikator dari mekanisme GCG yakni proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit, sedangkan struktur kepemilikan diukur dengan kepemilikan institusional. Serta indikator kinerja diukur oleh *return on asset* (ROA).

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara mekanisme *corporate governance*, struktur kepemilikan dengan kinerja perbankan?”

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

### 1. Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang pentingnya *corporate governance* pada dunia perbankan. Bagi peneliti lain, sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan *corporate governance* dengan kinerja.

### 2. Praktis

Sebagai bahan informasi dan referensi pada pihak perbankan untuk menjalankan mekanisme *corporate governance* sebaik mungkin agar dapat mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dari *good corporate governance* tersebut. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perbankan.